

ANALISIS MANAJEMEN USAHA PETANI DAN PERTANIAN DI KAWASAN AGROPOLITAN DUMOGA UNTUK MENOPANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Oleh:

Agus Supandi Soegoto¹
Jacky S.B. Sumarauw²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹supandi_smrt@yahoo.co.id
²jq_sbs@yahoo.com

ABSTRAK

Pertanian di Sulawesi Utara memiliki peran sentral, terutama dalam upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional. Masalah pangan dan ketahanan pangan, berorientasi pada ketersediaan dan distribusi pangan secara merata. Saat ini kebijakan pangan nasional, masih bertumpu pada beras karena beras merupakan bahan makanan utama bagi penduduk Indonesia. Kawasan Agropolitan Dumoga Sebagai Sentra Produksi Padi di Bolaang Mongondow Raya, merupakan sentra utama penghasil Beras, dimana penelitian ini dilaksanakan. Responden penelitian sebanyak 100 petani di 3 kecamatan Dumoga Bersatu. Tujuan penelitian untuk mengetahui: Permasalahan utama dari para petani dan pemerintah daerah dalam upaya untuk mempertahankan Dumoga sebagai sentra produksi padi untuk menopang ketahanan pangan nasional serta manajemen pengelolaan usaha tani dalam upaya menghasilkan produksi padi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan produktifitas hasil pertanian di kecamatan Dumoga, mengalami penurunan produksi, termasuk didalamnya infrastruktur pertanian yang tidak mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperhatikan adanya realitas pelambatan trend penawaran tenaga kerja di sektor pertanian. Perubahan tersebut secara sosial disebabkan adanya pandangan masyarakat petani bahwa bekerja sebagai petani sangat berat, secara ekonomis keuntungannya rendah, dan status mereka sebagai petani dipandang rendah, terutama bagi kalangan generasi muda di desa.

Kata kunci: sentra produksi, ketahanan pangan, potensi pertanian

FAKULTAS ABSTRACT EKONOMI DAN BISNIS

Agriculture in North Sulawesi has a central role, particularly as an effort to maintaining national food secured. The food issue and food secure, oriented on the availability and porpotional distribution of food. Today, the national food policy, still rely on rice because rice is Indonesian people main food. Dumoga, as an Agropolitan For Rice Produce Center in Bolaang Mongondow, is a major center for producing rice, where the research was conducted. Research respondents are 100 farmers in 3 districts at Dumoga area's. The purpose of research to find out: The main concern of farmers and local governments as an effort to maintaining Dumoga as rice produce center in supporting national food secured as well as the management of the farm effort to producing rice. The method used quantitative descriptive. The results showed the productivity of agriculture in t Dumoga district, decreased production, including agricultural infrastructure that not be able to increase agricultural productivity. Central and local governments also have to give attention to the existency of reality slowing trend of labor supply in the agricultural sectors. The changes are socially caused by a view of farming communities that their obligation work as a farmer is too heavy, low profits economically, and their status as a farmer in society has low grade performance especially among young generation point of view in Dumoga district area's.

Keywords: *production centers, food security, agricultural potential*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka pemanfaatan potensi daerah secara tepat merupakan satu prasyarat untuk percepatan pembangunan di daerah tersebut baik secara ekonomi maupun dari aspek lainnya. Provinsi Sulawesi Utara dalam prospektif regional maupun internasional berada pada posisi yang sangat strategis karena terletak di bibir Pasifik (Pasifik Rim) yang secara langsung berhadapan dengan Negara-negara Asia Timur dan Negara-negara Pasifik, sehingga menjadi lintasan antara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia dan dua Samudera yaitu Samudera India dan Pasifik. Publikasi Infosulawesiutara.blogspot.com (2010) menyatakan: Posisi strategis tersebut, menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam AFTA. Secara administratif, Provinsi Sulawesi Utara terbagi menjadi 6 kabupaten, 3 kotamadya dengan Manado sebagai ibukota provinsi. (Catatan, saat ini telah berkembang menjadi 11 kabupaten dan 4 kota).

Pertumbuhan dan perkembangan kabupaten dan kota tersebut, memiliki pesan untuk mempercepat pembangunan di daerah dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Pentingnya pemanfaatan dan pengembangan potensi kewilayahan juga merupakan salah satu isu penting, karena memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pengelolaan pembangunan di daerah, termasuk pembangunan nasional.

Dumoga merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menjadi kawasan andalan di Provinsi Sulawesi Utara sebagai sentra penghasil beras. Dumoga sampai saat ini masih merupakan daerah penghasil beras utama di kawasan Bolaang Mongondow Raya dan Provinsi Sulawesi Utara, sehingga memiliki peran yang penting dalam upaya pemenuhan pangan masyarakat, teruma dengan hasil pertanian berupa beras yang dapat diunggulkan.

Upaya untuk mempertahankan Dumoga sebagai sentra produksi padi di Provinsi Sulawesi utara memiliki peran strategis terutama dalam pembangunan nasional, termasuk di wilayah Kawasan Timur Indonesia. Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, (2002:7) menyatakan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi tidak dapat dilepaskan dari upaya percepatan pembangunan pada wilayah KTI, melainkan harus merupakan satu kesatuan konsepsi strategi pengembangan KTI yang utuh, mengingat peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu *prime-mover* pengembangan wilayah KTI disamping Pulau Kalimantan.

Pengembangan potensi pertanian sangat penting, termasuk pengembangan potensi para petani di Dumoga yang menjadi daerah utama penghasil beras di Bolaang Mongondow Raya. Pengembangan potensi pertanian dengan cara melihat peluang-peluang dan upaya-upaya untuk mengatasi ancaman permasalahan pertanian merupakan salah satu strategi yang dapat dikembangkan, untuk mengembangkan potensi dumoga sebagai salah satu sentra penghasil padi dan beras yang dapat diarahkan memiliki mutu dan tingkat produksi yang tinggi, sehingga harapan untuk mengembangkan kawasan agropolitan Dumoga sebagai sentra produksi padi untuk menopang ketahanan pangan nasional dapat terealisasi. Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002:8) menyatakan kawasan-kawasan strategis yang merupakan sentra produksi tanaman pangan di Pulau Sulawesi, meliputi: di Sulut (Dumoga, dsk); di Gorontalo (Gorontalo, dsk); di Sulteng (Palu dsk, Poso dsk, Kolonedale dsk), di Sultra (KAPET Buton-Kolaka-Kendari) dan di Sulsel (Makassar dsk, Palopo dsk, Bulukumba dsk, Mamuju dsk, KAPET Pare-Pare).

Daerah-daerah tersebut merupakan sentra pendukung ketahanan pangan nasional yang diarahkan untuk mendukung kebijakan substitusi import. Hal ini dicapai melalui pengembangan pola agroindustri terpadu dengan mengembangkan potensi pertanian, serta memiliki akses ke sentra produksi dan pasar regional/internasional dengan memanfaatkan secara maksimal pelayanan prasarana dan sarana yang tersedia. Terlepas dari peran sentral yang dimiliki daerah Dumoga tersebut, potensi masalah yang diduga dapat menjadi salah satu hambatan dan ancaman serius bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan Dumoga sebagai sentra pendukung ketahanan pangan nasional antara lain:

1. Potensi terjadinya penurunan produksi, akibat bergesernya pandangan penduduk terhadap peran dan potensi pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduk, sehingga banyak anak-anak petani yang mulai meninggalkan profesi pertanian dan beralih kepada bidang-bidang lainnya.
2. Semakin berkurangnya areal pertanian, akibat terjadinya alih fungsi pertanian menjadi areal-areal pemukiman/ perumahan rakyat karena penyebaran penduduk yang cepat dan tidak disertai aturan yang tegas dari pemerintah mengenai pemanfaatan lahan yang ada.
3. Merosotnya hasil produksi pertanian akibat kesalahan produksi, termasuk dalam bercocok tanam, terjadinya serangan penyakit tanaman padi, dll., yang mempengaruhi kondisi ekonomi para petani.
4. Adanya perambahan hutan, perusakan areal hutan lindung oleh oknum-oknum tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil pertanian termasuk kualitas hasil produksi pertanian.
5. Pengelolaan pasca panen hasil produksi pertanian yang masih lemah, termasuk dalam tata niaga hasil pertanian yang lemah, sehingga petani tidak dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang seharusnya mereka terima untuk meningkatkan kesejahteraannya.
6. Munculnya masalah-masalah sosial kemasyarakatan baru, akibat munculnya usaha tambang emas rakyat dan tromol-tromol yang dioperasikan masyarakat yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap para petani dan profesinya (karena diduga banyak yang kemudian beralih profesi, karena daya tarik untuk memperoleh emas secara cepat).

Upaya-upaya untuk mencari solusi akibat perambahan hutan dan perusakan terhadap hutan lindung (Taman Nasional Nani Wartabone-TNNW), oleh masyarakat baik melalui penebangan pohon atau penambangan liar juga merupakan permasalahan lainnya yang perlu dicermati secara akademik, sehingga dapat dicari upaya-upaya sebagai alternatif solusi baik secara sosial ekonomi kemasyarakatan, maupun secara hukum. Hal ini dipertimbangkan mengingat potensi kawasan hutan, yang memiliki peran yang besar bagi masyarakat dan dunia secara umum. Pemanfaatan areal hutan secara tepat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional. Informasi yang diperoleh melalui Infosulawesiutara.blogspot.com (2010:2), Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki kawasan hutan yang potensial. Pemanfaatan hasil hutan baru mencapai sekitar 47,5 % dari seluruh areal hutan produksi yang ada. Jenis hutan yang ada di Sulawesi Utara adalah hutan lindung, hutan PPA, hutan bakau, dan hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi tetap, terbatas, dan konversi. Dengan demikian, pemanfaatan hutan secara tepat dan terarah merupakan salah satu kunci untuk mengembangkan potensi hasil hutan dengan cara meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan bagi pengelolaan hutan yang tepat.

Potensi-potensi masalah tersebut, tidak dapat dibiarkan yang kemudian memberikan dampak negatif, dan munculnya masalah-masalah baru seperti penurunan produksi pertanian, masalah-masalah ekonomi seperti kekurangan modal pertanian, terjeratnya para petani kepada para rentenir, perkelahian antar kampung akibat memperebutkan lahan garapan (masalah pada tromol-tromol emas), dll. Dampak akhirnya tentu hal ini akan menjadi hambatan bagi upaya-upaya untuk mencapai tujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana tantangan bagi para petani dan pemerintah dalam upaya untuk mempertahankan Dumoga sebagai sentra produksi padi untuk menopang ketahanan pangan nasional.
2. Bagaimana manajemen pengelolaan usaha tani dalam upaya untuk menghasilkan produksi padi sebagai hasil pertanian andalan bagi Kab. Dumoga bersatu.
3. Masalah utama apakah yang dihadapi oleh para petani dalam proses produksi padi dihubungkan dengan target pencapaian produksi hasil pertanian.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pertanian Terpadu

Pengelolaan pertanian secara tepat dan terpadu merupakan prasyarat mutlak bagi kemajuan pembangunan pertanian pada umumnya. Potensi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Utara, yang kaya akan hasil-hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya merupakan modal awal bagi percepatan pembangunan di wilayah ini.

Dalam konsep pembangunan pertanian, konsep pembangunan yang diarahkan kepada produk-produk yang diunggulkan merupakan salah satu prasyarat saat ini, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pasar yang selektif. Kemudian, untuk dapat bersaing secara global, setiap daerah perlu merumuskan visi dan misinya sebagai pola dasar perkembangan wilayah yang ada di dalamnya. Perumusan visi dan misi spesifik, unik, tepat dan akurat akan mendorong suatu wilayah meraih keunggulan daya saing yang berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*), berorientasi pada komoditas setempat, pemilihan strategi pertimbangan ekonomi dilengkapi dengan pertimbangan ekologi dan sosialbudaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Tambajong (2011:1) menyatakan Sulawesi Utara secara komparatif (*comparative advantage*) memiliki keunggulan sumber daya alam melimpah. Di daratan, memiliki komoditas unggulan padi, kelapa, cengkeh, pala, hortikultura. Di laut memiliki perikanan tangkap, perikanan budidaya dan rumput laut. Kekuatan di darat dan laut merupakan potensi unggulan yang belum tergarap secara maksimal (belum kompetitif) dengan kata lain masih di jual dalam bentuk *primer product* seperti padi, kopra, biji dan fulli pala, ikan beku dan rumput laut kering. Pengolahan lebih lanjut sebagai *intermediate* dan *final product* masih dilakukan di daerah lain bahkan di Negara lain. Sehingga nilai tambah terbesar dari komoditas unggulan kita, bukan dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Utara. Dengan kata lain petani di daerah sentra-sentra agribisnis hanya menikmati nilai tambah dari subsistem *on farm* agribisnis yang umumnya relatif kecil. Nilai tambah yang paling besar, yakni pada subsistem agribisnis hulu dan hilir, dinikmati oleh para pedagang atau pengusaha luar daerah. Inilah yang menyebabkan mengapa pendapatan petani tetap rendah dan ekonomi daerah sentra-sentra agribisnis kurang berkembang. Nugroho (2011:37) menyatakan pusat perhatian dan perencanaan wilayah yang tepat, termasuk juga pengendalian akses dan kepemilikan barang publik. Dengan mekanisme kepemilikan yang tepat, siklus hidup dan aliran manfaat sumber daya dapat terpelihara, dimanfaatkan secara baik dan optimal.

Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu strategi nasional untuk pengembangan kawasan dan upaya untuk mengoptimalkan kawasan menjadikan sebagai sumber potensi bagi pemenuhan kebutuhan penduduk akan pangan baik secara lokal maupun nasional. Salah satu tujuan pengembangan kawasan agropolitan, adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian, dengan kata lain para petani di daerah sentra-sentra agribisnis dapat menikmati nilai tambah dari subsistem *on farm* agribisnis yang nilainya dapat ditingkatkan. Sehingga kesan adanya kesenjangan terhadap nilai tambah ditingkat petani yang umumnya kecil dengan nilai tambah yang paling besar, yakni pada subsistem agribisnis hulu dan hilir, yang dapat dinikmati oleh para pedagang atau pengusaha luar daerah dapat diminimalkan. Tujuan strategis ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan ekonomi daerah sentra-sentra agribisnis yang bisa berkembang. Dengan konsep pengembangan kawasan berdasarkan komoditas unggulan, maka sejak 2003 sampai saat ini Sulawesi Utara sudah memiliki 7 Kawasan Agropolitan dan 3 Kawasan Minapolitan.

- 1) Agropolitan Dumoga (padi);
- 2) Agropolitan Modoinding dengan komoditas unggulan hortikultura;
- 3) Agropolitan Pakakaan (peternakan);
- 4) Agropolitan Tomohon (florikultura);
- 5) Agropolitan Dagho (perikanan tangkap);
- 6) Agropolitan Klabat (perikanan air tawar);
- 7) Agropolitan Ngaasan (perkebunan kelapa);
- 8) Minapolitan Tatapaan; Minapolitan Managabata dan Minapolitan Tabukan Selatan dengan komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya.

Tambajong (2011:1) menyatakan agar pembangunan ekonomi daerah dapat benar-benar dinikmati oleh rakyat, maka sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan di setiap daerah haruslah sektor ekonomi yang dapat mendayagunakan sumber daya lokal (*foot lose industry*) yang terdapat atau dikuasai oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Konsep Pengembangan Ekonomi Pertanian

Studi pembangunan di negara-negara berkembang banyak berkaitan dengan berbagai isu seperti kemiskinan, ketidakmerataan, pengangguran, dan stagnasi/ kemandekan pedesaan. Jhingan menyatakan ilmu ekonomi pembangunan mengacu kepada berbagai masalah perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang (Jhingan: 1983). Todaro (1981) menyatakan ekonomi pembangunan termasuk pertanian, berkaitan dengan permasalahan alokasi sumberdaya secara efisien dan pertumbuhan yang lestari dari waktu ke waktu, juga menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme- mekanisme perkonomian, sosial, dan kelembagaan baik yang ada di pemerintahan maupun di sektor swasta.

Sanusi (2004:5) menyatakan pengembangan ekonomi termasuk dibidang pertanian, berkaitan dengan proses-proses politik serta perekonomian yang dibutuhkan guna mempengaruhi transformasi struktural serta kelembagaan dari seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang akan menghasilkan adanya kemajuan-kemajuan ekonomi secara efisien bagi kebanyakan penduduk. Todaro (1981) menambahkan perencanaan ekonomi yang terkoordinasi dan kebijaksanaan ekonomi dalam negeri dan internasional yang berwawasan luas merupakan prasyarat mutlak untuk pencapaian tujuan ekonomi.

Permasalahan Sosial Masyarakat Petani

Todaro (1981) menyatakan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang dan juga para ahli, termasuk ahli ilmu ekonomi diantaranya 70-80% penduduk di negara-negara berkembang tinggal di pedesaan, sehingga orientasi pembangunan adalah bagaimana baiknya untuk melaksanakan peningkatan pembangunan pertanian di pedesaan. Tambajong (2011:3) menyatakan para petani yang mengelola lahan pertanian secara langsung hanya menikmati nilai tambah dari subsistem *on farm* agribisnis yang umumnya relatif kecil.

Permasalahan lainnya melalui konsep pengembangan kawasan berdasarkan komoditas unggulan, sejak tahun 2003 sampai saat ini ternyata belum mampu menggerakkan petani dan nelayan untuk masuk kedalam agroindustri / *home industry* pengolahan produk. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur (Tambajong 2011:3). Infrastruktur adalah pendukung bagi kegiatan utama dalam suatu wilayah, mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, serta memicu kegiatan produksi.

Ketidakmampuan memberikan pelayanan infrastruktur merupakan indikasi kemampuan pemerintah yang semakin terbatas dalam kapasitas pembiayaan. Infrastruktur tidak hanya terbatas pada prasarana dan sarana fisik saja, melainkan mempunyai fungsi yang lebih penting lagi yaitu fungsi jasa pelayanan. Dalam hal ini jasa pelayanan mempunyai tiga dimensi penting yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Infrastruktur dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu Infrastruktur yang bersifat *software* seperti: kebijaksanaan, kelembagaan, regulasi, keuangan, penelitian dan pengembangan, tata ruang, dan lain-lain; serta Infrastruktur yang bersifat *hardware* seperti: jalan, jembatan, irigasi, pasar, pelabuhan, jaringan listrik, telepon, dan lain sebagainya.

Secara komprehensif perlu dikembangkan infrastruktur yang menunjang sistem agribisnis pada kawasan. Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis maka di kawasan tersebut tidak saja membangun usaha budidaya (*on farm*) saja tetapi juga *off farm*-nya yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, kesenjangan antara kota dan desa dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Rancangan menyeluruh diperlukan, agar dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terutama rancangan menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk rumusan operasional menggunakan metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu situasi sosial.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini berlokasi di 3 kecamatan Dumoga Bersatu. Responden penelitian sebanyak 100 petani. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Maret s.d Oktober 2014 Menurut Sugiyono (2013:346) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data kualitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk ucapan, kalimat, perilaku, dan peristiwa yang berkaitan dengan peranan sistem subak dalam membangun kemandirian pertanian pangan berbasis padi di kawasan agropolitan Dumoga. Jenis-jenis data dieksplorasi sedalam-dalamnya dari (1) Responden penelitian, dengan cara menyebarkan kuisioner dan teknik wawancara (*in dept interview*), (2) peristiwa perilaku dan tindakan diperoleh melalui teknik observasi partisipasi (*participatory observation*), (3) dokumen, baik verbal (teks lisan yang berupa rekaman wawancara, dan (4) berkaitan dengan konteks sosial, historis, situasi; tempat dan lingkungan sekitarnya yang mempengaruhinya. Arikunto (2003:107) menyatakan sumber data, yaitu (1) *person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara, (2) *place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak (data observasi), (3) *paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol, dan sebagainya (data dokumentasi).

Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer ini ada dua yaitu data umum perusahaan dan data khusus perusahaan. Data umum perusahaan ini berupa data mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. Data khusus perusahaan ini berupa data penjualan, data yang berkaitan dengan penentuan harga dan data laporan pendapatan dan biaya.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Secara keseluruhan data yang dimaksud adalah penggunaan bahan baku, volume penjualan, harga jual, biaya variabel, biaya tetap.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif kualitatif dan interpretatif, artinya data yang sudah didapat dari informan dianalisis setiap meninggalkan lapangan. Secara umum proses analisis telah dimulai sejak peneliti menetapkan fokus permasalahan dan lokasi penelitian, kemudian menjadi intensif ketika sudah terjun ke lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kawasan Agropolitan Dumoga

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah daerah otonom baru dalam wilayah administratif Propinsi Sulawesi Utara, yang dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2007. Sejak berstatus daerah otonom, perekonomian daerah terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Pada Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tahun 2008

dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki batas-batas: Utara - Laut Sulawesi; Selatan - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; Barat - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan Timur - Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kabupaten Bolaang Mongondow secara administratif terbagi kedalam 12 kecamatan dan 192 desa/kelurahan. Luas keseluruhannya mencapai 3 506,24 Km².

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki luas wilayah sebesar: 4.083,94 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 213.484 jiwa. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan daerah produsen komoditi pertanian dan perikanan, yang sebagian besar dihasilkan oleh usaha mikro, seperti beras, jagung, kopra, ternak dan ikan. Komoditi-komoditi ini, berpeluang untuk dijadikan komoditi unggulan daerah Karen atelah memiliki pasar, baik ditingkat local maupun ditingkat regional. Walaupun tersedia potensi komoditi atau produk unggulan, namun kondisi perdagangan atau tata niaga yang berlangsung selama ini tidak efisien, sehingga menghambat berkembangnya usaha mikro terkait. Berdasarkan hasil observasi lapangan, bebrapa fakta sehubungan dengan perdagangan/tata niaga komoditi di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem perdagangan/tata niaga komoditi terjadi secara lokal.
- 2) Saluran distribusi perdagangan tidak berpola.
- 3) Tingginya biaya transportasi dalam aktivitas perdagangan.
- 4) Ditemukan banyak perantara pemasaran dan kondisi demand-supply tidak berimbang, yang mengantarkan produsen dalam posisi price taker. Situasi ini mematikan peran koperasi sebagai alat perjuangan petani, bahkan koperasi sendiri dilanda konflik of interest.
- 5) Transaksi diwarnai asimetri informasi karena petani dan nelayan tidak mengetahui harga dipasar regional. Harga dipasar lokal dipengaruhi oleh harga transaksi yang dikendalikan oleh pedagang pengumpul luar.

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow ditopang oleh 4 (empat) sektor utama, yaitu: Umum, Primer, Sekunder dan Tersier dimana peran masing-masing sektor berfluktuasi. Apabila data diatas disederhanakan menjadi data Pertumbuhan Ekonomi selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2005 s.d 2010 maka akan diperoleh rata-rata Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,65 dimana Pertumbuhan Ekonomi tertinggi sebesar 7,64 Pada Sektor sekunder, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi terendah sebesar -1,0 pada sektor tersier.

Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow masih rendah dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengejar ketertinggalan ekonomi dibandingkan dengan daerah lainnya baik di Sulawesi Utara maupun secara nasional. Di bidang pertanian dan tanaman pangan hasil observasi awal dalam penelitian, maupun hasil penelitian lapangan Tim Pengkaji memperoleh gambaran bahwa posisi *price taker* dari para petani khususnya dalam sistem tata niaga memberikan kerugian nilai tambah bagi para petani, dan tentunya akan merugikan perekonomian daerah.

Kabupaten Bolaang Mongondow wilayahnya banyak dijumpai komoditi jagung, kopra, beras, ikan dan sapi potong yang dihasilkan oleh para petani, nelayan dan pemeliharaan ternak. Karena jumlah masyarakat yang mengusahakan komoditi-komoditi ini sangat banyak, dikenal sebagai petani, nelayan dan pemelihara ternak, maka peran dari komoditi-komoditi ini sangat besar bagi maju mundurnya perekonomian daerah Bolaang Mongondow.

Bagi para petani, nelayan dan peternak sendiri, hasil dari komoditi merupakan tumpuan hidup mereka, sehingga kegagalan dalam usaha tani, nelayan dan ternak tersebut akan membuat mereka hidup miskin dan mengalami kemunduran dalam aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mereka. Arti pentingnya komoditi Padi bagi daerah dan pelaku tata niaga usaha beras, menjadikan komoditi ini dapat dikatakan menjadi produk unggulan daerah baik di Kabupaten Bolaang Mongondow, maupun Sulawesi Utara.

Profil Petani di Dumoga

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap profil para petani di wilayah Dumoga yang menjadi sentra produksi beras bagi masyarakat Bolaang Mongondow Raya, Sulawesi Utara maupun kontribusinya terhadap produksi padi secara nasional di Indonesia. Pentingnya penelitian ini mengingat bahwa dinamika sosial ekonomi

masyarakat pertanian khususnya di pedesaan memiliki urgensi yang penting untuk dikaji antara lain karena: (1) menjadi indikator penting untuk perbaikan perekonomian nasional utamanya dengan mencermati kondisi sosial ekonomi pedesaan, khususnya di wilayah Dumoga; (2) untuk memprediksi kondisi produksi sektor pertanian saat ini dan tahun mendatang; (3) menjadi basis data untuk kepentingan pelaksanaan program pembangunan pertanian tertentu misalnya rencana pengembangan produksi pertanian dan program spesifik lainnya, seperti intensifikasi hasil pertanian; dan (4) menjadi sarana untuk mengukur seberapa jauh manfaat program-program yang telah dilaksanakan atau pembangunan yang telah berjalan selama ini, dikaitkan dengan kesejahteraan dari para petani.

Alasan lainnya adalah problematika yang dialami masyarakat petani saat ini telah banyak berubah, terutama pada era komunikasi saat ini, dimana kondisi masyarakat Indonesia menjadi sangat dinamis, termasuk para petani. Dalam kondisi demikian untuk meningkatkan efektivitas suatu kebijakan pembangunan pertanian diperlukan ketersediaan informasi tidak hanya lengkap tetapi akurat dan sesuai dengan kondisi para petani tersebut.

Melalui survey dan observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi terkini, dan para pengambil kebijakan dapat mengetahui apakah arah pembangunan yang dilakukan dari tahun ke tahun saat ini, sudah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang tidak harus menunggu setelah proses pembangunan jangka menengah dan jangka panjang tersebut dilaksanakan ataupun berakhir, sehingga akibatnya dapat terlambat untuk mengambil kebijakan.

Hasil observasi tahun 2014 dan data sekunder yang terdapat di beberapa kecamatan di Dumoga bersatu, bahwa kawasan transmigrasi Dumoga bukan saja dihuni oleh transmigran etnik Bali saja, akan tetapi dihuni pula oleh transmigran etnik Jawa, terutama yang menempati Desa Mopuya dan Desa Mopugad. Di sisi lain terdapat juga transmigran lokal Sulawesi Utara, terutama yang berasal dari etnik Minahasa dengan menempati beberapa desa di kawasan transmigrasi Dumoga, seperti Desa Tonom, Mogoyungung, Dondomon, Kosioq, Tambun, Torahat, Ibolian, dan Kinomaligan.

Wilayah transmigrasi Dumoga, perkembangannya dapat dikategorikan sangat pesat karena adanya transmigran spontan dari etnik Bali, etnik Jawa, etnik lokal Sulawesi Utara, dan juga pencari kerja dari daerah-daerah lain, seperti Gorontalo, Makasar, Jawa, Minahasa, Toraja, dan Sangehe. Kedatangan transmigran spontan maupun pencari kerja dari beberapa daerah, serta termotivasi oleh keberhasilan para transmigran asal Bali dan Jawa di kawasan Dumoga. Para transmigran lokal yang masuk ke wilayah Dumoga memiliki latar belakang kehidupan sosial ekonomi yang berbeda dengan penduduk asli Bolaang Mongondow yang secara turun temurun telah menghuni dan beraktivitas di daerah Dumoga. Perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan budaya, terutama sosial budaya dan adat istiadat yang dapat mempengaruhi pola kehidupan bermasyarakat etnik pendatang maupun etnik asli yang sampai saat ini tidak menimbulkan terjadinya konflik antaretnik.

Pembahasan

Demografi para petani penting untuk diperhatikan, mengingat melalui paparan ini dapat dilihat berapa sebenarnya tanggungan (angka ketergantungan, keluarga) dari para petani dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini juga akan berkaitan dengan kesejahteraan keluarga petani dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Hasil Sensus Pertanian tahun 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar (47%-84%) keluarga mempunyai jumlah anggota rumahtangga antara 3-4 orang.

Data hasil Sensus Pertanian ini memiliki kesesuaian dalam jumlah, karena bila dibandingkan dengan hasil survey yang telah dilaksanakan dimana jumlah anggota rumah tangga petani antara 3 – 5 orang yaitu 76 responden (76%), kemudian sebanyak 17 responden (17%) memiliki anggota rumah tangga 6 – 9 orang, dan terdapat 7 responden (7%) memiliki anggota rumah tangga 1 – 2 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76% responden memiliki anggota rumah tangga petani sebanyak 3 – 5 orang, namun demikian masih sebanyak 17% yang memiliki anggota rumah tangga 6 – 9 orang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa: 1) Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya keluarga berencana, dikaitkan dengan kesejahteraan para petani, 2) Melakukan edukasi bahwa apabila angka ketergantungan tinggi terhadap para petani, maka dengan sendirinya akan mengurangi tingkat kesejahteraan para petani, karena dikuatirkan hasil produksi pertanian, dan pendapatan bersih para petani hanya akan digunakan untuk membiayai kepentingan keluarga dari para petani (untuk kepentingan konsumsi keluarga).

Hasil sensus secara nasional, sebesar 69 persen petani masih berada dalam usia produktif yaitu antara 25-54 tahun, 26 persen berusia di atas 54 tahun dan hanya 5 persen yang berusia di bawah 25 tahun. Hasil sensus tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan dimana hasil survey yang dilakukan terhadap para petani di Dumoga menunjukkan bahwa para petani masih berada pada kategori usia produktif, dimana responden yang terbanyak adalah responden berusia antara 20-58 tahun yaitu sebesar 93 orang (93%), dan hanya terdapat 7 orang responden (7%) yang berusia > 58 tahun. Dengan demikian dari segi usia para petani di Dumoga masih prospektif untuk mengembangkan pertanian dengan baik, apalagi terhadap rencana untuk mengembangkan Kecamatan Dumoga sebagai sentra produksi beras di Sulawesi Utara dan Nasional.

Hasil survey yang dilakukan terhadap para petani di Dumoga menunjukkan bahwa responden terbanyak berpendidikan SMP yaitu 43 responden (43%), kemudian SMA sebanyak 39 responden (39%) dan sisanya berpendidikan SD sebanyak 18 responden (18%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah (SD & SMP sebanyak 61%) dan sisanya berpendidikan SMA 39%. Berbeda dengan sikap petani terhadap pendidikan anak-anaknya, dimana banyak para petani di Dumoga yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum dengan tujuan, agar nanti mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik di kota.

Pandangan tersebut menyebabkan terjadinya migrasi kaum muda desa untuk bekerja dan mengadu nasib di kota termasuk untuk menjadi pekerja bangunan/konstruksi di kota Manado. Pada kaum muda usia adanya pandangan bahwa pekerjaan sebagai petani adalah sengsara, rendah dan kotor. Pandangan ini menyebabkan banyak penduduk usia muda yang memiliki keengganan untuk bekerja sebagai petani (di sektor pertanian).

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2012

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	31.417	29.287	60.704
5-9	30.407	28.582	58.989
10-14	32.717	30.918	63.635
15-19	28.641	26.821	55.642
20-24	26.721	25.594	52.315
25-29	26.142	24.994	51.136
30-34	24.536	23.514	48.050
35-39	21.597	21.511	43.108
40-44	19.286	19.500	38.786
45-49	17.634	17.671	35.035
50-54	14.732	13.212	27.944
55-59	10.511	9.254	19.765
60-64	6.872	7.019	13.891
65-69	5.160	5.150	10.310
70-74	3.860	4.127	7.987
75+	4.423	4.835	9.258
Jumlah	304.386	291.989	596.375

Sumber: st2013.bps.go.id., 2014.

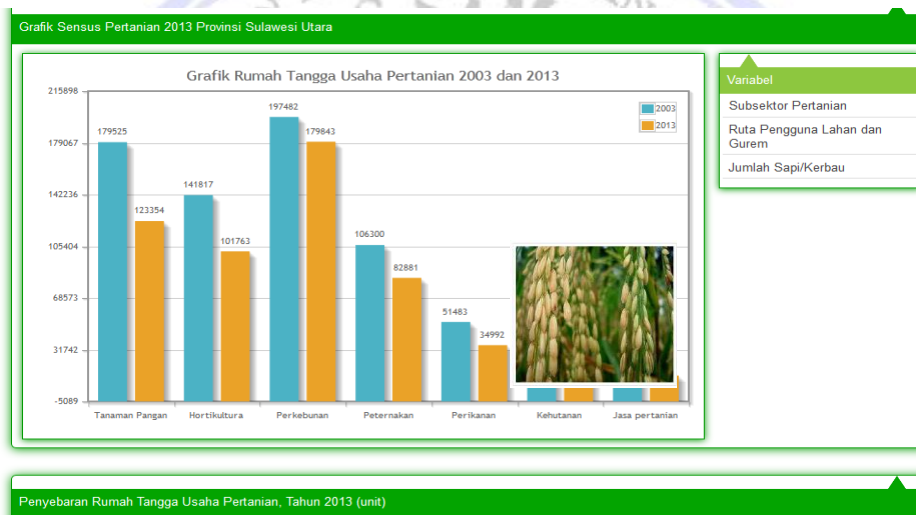
Penyebab yang lain adalah insentif yang tidak menarik, karena harga hasil produksi pertanian yang relatif rendah, harga pupuk dan obat-obatan yang mahal, dan pemilikan lahan yang sempit, dapat menyebabkan pendapatan hasil pertanian yang rendah, akibatnya terjadi pergeseran orientasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor jasa. Permasalahan lainnya yaitu adanya kecenderungan pergeseran yang diikuti oleh pengalihan aset lahan dari pertanian ke non pertanian seperti lahan produktif yang kemudian tidak diiri kemudian diubah fungsinya menjadi rumah dan pekarangannya. Hal tersebut akan menyebabkan masalah, bahkan akan menurunkan produktivitas. Namun jika terjadi sebaliknya, aset lahan misalnya dijual untuk investasi non-pertanian diduga selain produktivitas menjadi menurun, juga produksi pangan akan semakin berkurang.

Penguasaan aset oleh para petani penting untuk dikaji, mengingat bahwa aspek penguasaan terhadap lahan pertanian merupakan salah satu faktor yang menentukan keuntungan usaha dan tingkat kesejahteraan dari para petani. Hasil Hasil Sensus Pertanian tahun 2013, menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki lahan kurang dari 0.5 hektar (55,33%). Rumah tangga pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar) dan rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 hektar atau lebih). Hasil ST2013 menunjukkan bahwa

jumlah rumah tangga pengguna lahan di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 25.751.267 rumah tangga, dengan jumlah rumah tangga petani gurem sebanyak 14.248.864 rumah tangga (55,33%). Sedangkan Hasil ST2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pengguna lahan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 sebanyak 246.394 rumah tangga, dengan jumlah rumah tangga petani gurem sebanyak 72.055 rumah tangga atau sekitar 29,24 persen.

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan yang menunjukkan luas lahan yang dimiliki oleh para petani di Dumoga dalam berusaha tani masih rendah. Sebagian besar petani hanya memiliki luas lahan antara < 0,5 sampai dengan 3 hektar yaitu sebanyak 64%. Responden terbanyak sebesar 39 responden (39%) memiliki luas lahan kepemilikan antara 0,5 – 1 hektar, kemudian sebanyak 28 responden (28%) memiliki lahan kepemilikan 1 – 3 hektar, terdapat 25 responden (25%) memiliki lahan kepemilikan < 0,5 hektar, dan sebanyak 8 responden (8%) memiliki lahan kepemilikan 3 – 5 hektar.

Lahan pertanian merupakan salah satu modal dalam usaha di bidang pertanian. Berdasarkan hasil ST2013, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan hasil ST2003. Rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga hasil ST2013 adalah 8 925,64 m², dengan rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian adalah sebesar 8 581,19 m², naik sebesar 144,51 persen dibandingkan hasil ST2003 yang tercatat sebesar 3 509,59 m² (st2013.bps.go.id.,2014).



Sumber: st2013.bps.go.id., 2014.

Gambar 1. Grafik Rumah Tangga Usaha Pertanian 2003 dan 2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan oleh para petani di kecamatan Dumoga masih lebih baik dibandingkan hasil Sensus Pertanian secara nasional, dimana masih terdapat 28% responden yang memiliki lahan sebesar 1 – 3 hektar, dan 8% responden yang memiliki lahan sebesar 3 – 5 hektar. Penguasaan lahan yang lebih besar tersebut, akan memungkinkan bagi para petani memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang hanya memiliki luas lahan kurang dari 0.5 hektar.

Penggunaan benih padi sawah pada para petani di Dumoga, lebih berorientasi kepada bibit padi yang disukai oleh masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Sulawesi Utara pada umumnya. Masyarakat menggunakan bibit jenis Serayu dengan tujuan karena hasil produksinya lebih banyak dibandingkan jenis padi lainnya, dimana per ha sawah hasilnya mencapai 2,5 ton padi/hektar dan lebih tahan terhadap hama. Umumnya para petani di Dumoga sangat menyukai dengan hasil panennya, karena jenis padi ini memiliki rasa yang lain dalam arti pulen dan lengket. Produksiana.wordpress.com., (2010) mengkategorikan Serayu sebagai varietas Padi Unggul bersama-sama IR-68, IR-70, IR-72, IR-74, Memberamo, dll. Bila dibandingkan dengan upaya pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2011, untuk meningkatkan produksi padi dimana jenis padi yang digunakan adalah Padi jenis Serayu, melalui Program “Gerakan Tanam Padi” dengan tujuan untuk penguatan pangan perberasan dimana dalam Program Gentadi 10, ditargetkan

pencahayaan produksi Padi sebesar 10 ton/hektar (antaranews.com. 2012). Hasil produksi padi para petani di Kecamatan Dumoga, termasuk rendah sehingga perlu ditingkatkan. Hama yang sering menyerang tanaman padi di Dumoga masih di dominasi oleh hama tikus, dan hama yang menempel di batang padi sehingga padi menjadi berat dan roboh.

Di lokasi penelitian penggunaan benih pada usahatani padi sawah kisarannya antara 40-45 kg/ha. Sebagian besar (90%-97%) petani menggunakan benih padi sawah berkisar dengan tingkat pemakaian sebesar 25-48 kg/ha. Dalam hal ini, petani menggunakan benih jauh di atas dosis anjuran dengan viabilitas lebih dari 94% kebutuhan benih per hektar sekitar 30 kg (Sumaryanto, 2004). Sedangkan secara nasional penggunaan benih pada usaha tani padi sawah mencapai 44 kg/ha.

Apabila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian pada tahun 2013, maka rata-rata penggunaan benih di lokasi penelitian makin meningkat (47-60 Kg/ha), kecuali di Werdhi Agung antara (20-30 Kg/Ha) sudah sesuai dengan dosis anjuran. Hal ini merupakan pemborosan dan dapat menyebabkan kegagalan perencanaan produksi benih. Akibatnya ketersediaan benih di pasar jauh di bawah yang dibutuhkan. Keterbatasan benih di pasar diantisipasi para petani dengan menggunakan benih turunan. Penerapan teknologi seperti ini, dapat menurunkan produktivitas padi.

Untuk mendapatkan benih, sebagian besar petani di Dumoga membeli di kios Saprodi. Namun demikian banyak juga petani yang menggunakan benih hasil produksi sendiri, seperti di Desa Kembang Merta, dan Desa Imandi. Mereka menggunakan benih turunan karena harga benih berlabel dianggap relatif mahal, sementara menurut para petani hasil benih turunan masih cukup baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mempertahankan Dumoga sebagai sentra produksi padi untuk menopang ketahanan pangan nasional, terutama bagi pemerintah daerah, adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian di kecamatan Dumoga bersatu yang mengalami penurunan produksi, termasuk untuk menyediakan infrastruktur pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan. Disamping itu pemerintah pusat dan daerah juga harus memperhatikan adanya realitas pelambatan trend penawaran tenaga kerja di sektor pertanian. Perubahan tersebut secara sosial disebabkan adanya pandangan pada masyarakat petani bahwa bekerja sebagai petani sangat berat, secara ekonomis keuntungannya rendah, dan status mereka sebagai petani dipandang rendah apabila dibandingkan dengan profesi lainnya di kota terutama bagi kalangan generasi muda di desa.
2. Manajemen pengelolaan usaha tani dalam upaya untuk menghasilkan produksi padi sebagai hasil pertanian sebagian besar masih manajemen yang sederhana, yang mengandalkan pengalaman mereka sebagai petani. Sebagian besar petani di kecamatan Dumoga bersatu menggunakan jumlah benih pada usahatani padi di sawah melebihi dosis anjuran. Hal ini merupakan pemborosan dan menyulitkan perencanaan produksi benih yang baik. Akibat lainnya ketersediaan benih di pasar menjadi jauh di bawah kebutuhan, sehingga para petani menggunakan benih turunan dengan produktivitas yang rendah, hal ini menyebabkan rendahnya laba yang diperoleh dari usaha tani.
3. Masalah utama yang juga dihadapi para petani di Dumoga dalam berproduksi adalah ketersediaan air irigasi yang tidak memadai. Air irigasi terutama pada musim kemarau menjadi sangat berkurang, bahkan saluran-saluran irigasi teknis menjadi kering sehingga usaha tani menjadi terhenti. Hal ini perlu perencanaan kembali, terhadap optimalisasi fungsi waduk, saluran air, dan optimalisasi fungsi hutan sebagai sumber ketersediaan air terutama pada usahatani padi, karena air merupakan prasyarat utama untuk berproduksi dan untuk menerapkan teknologi lainnya.
4. Permasalahan lainnya adalah terjadinya penurunan hasil produksi, baik dari hasil produksi padi per hektar, maupun jumlah produksi dalam setahun yang biasanya 3 kali dalam setahun, petani di Dumoga ternyata di beberapa desa hanya berproduksi 1 kali dalam setahun akibat sangat minimnya ketersediaan air untuk irigasi. Disamping itu kenaikan harga bibit, pupuk, dan penggunaan insektisida yang mahal, menjadikan usaha tani memiliki margin keuntungan yang tipis, sehingga laba bersih para petani rendah.

Saran

Saran dapat yang disampaikan, adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan perbaikan infrastruktur jaringan irigasi merupakan kebutuhan utama para petani di Kecamatan Dumoga Bersatu yang sebaiknya segera direncanakan bersama baik oleh Pemerintah pusat, Provinsi, dan Daerah. Prioritas untuk segera dilakukan secara terpadu meliputi irigasi primer, sekunder, tersier maupun irigasi desa. Sebaiknya pemerintah provinsi/ kabupaten juga berkoordinasi secara intensif dengan Departemen terkait seperti PU, Departemen Kehutanan, Pertanian. Peningkatan prasarana di tingkat desa dan tingkat usahatani tidak akan optimal tanpa dikembangkannya sistem pengairan utama yang sangat dibutuhkan tersebut.
2. Untuk menjaga ketersediaan air irigasi pada waduk Kosinggolan dan Toraut, sebaiknya Pihak Kementerian Kehutanan, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupaya untuk tetap menjaga kelestarian dan merevitalisasi hutan lindung yang berada di Kawasan Bolaang Mongondow Raya, hal ini harus segera dilakukan mengingat banyaknya perambahan hutan lindung, eksploitasi tambang secara liar dikawasan hutan lindung di Kawasan Dumoga Bersatu yang mneyebabkan terjadinya pengurangan debit air dan adanya bahaya pencemaran limbah merkuri akibat pengolahan hasil tambang secara liar.
3. Mengingat sempitnya penguasaan lahan pertanian yang dimiliki para petani di Dumoga, maka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani dapat dilakukan dengan meningkatkan akses para petani terhadap lahan melalui pembukaan lahan pertanian baru dan meningkatkan intensitas tanam (intensifikasi pertanian). Dalam hal ini peran dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk membuat program peningkatan akses para petani terhadap lahan dan intensifikasi pertanian, serta pendampingan terhadap pola dan waktu tanam dari para petani, serta pengontrolan hama secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews.com. 2012. BI Gandeng Pemkab, TNI Tanam Padi di Mitra Sulut. <http://www.antaraneews.com/berita/337194/bi-gandeng-pemkab-tni-tanam-padi>. Sabtu 6 Oktober 2012. Diakses Tanggal 2 Oktober 2014.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Sulawesi Dikaitkan Dengan Transportasi Jalan Rel. Seminar Nasional Pembangunan Perkeretaapian Sulawesi (Trans Sulawesi Railway)* dengan tema Urgensi Pembangunan Perkeretaapian di Sulawesi dalam rangka Percepatan Pengembangan Ekonomi Regional. Diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2002 di Manado, Sulawesi Utara.
- Infosulawesiutara.blogspot.com. 2010. *Profil Provinsi Sulawesi Utara*. http://infosulawesiutara.blogspot.com/2010_02_01_archive.html. Diakses tanggal 19 Maret 2013.
- Jhingan, M.L. 1983. *The economics of Development and Planning*. Sixteenth Edition, New Delhi: Vicas Publishing House Ltd.
- Tambajong, Liny. 2011. *Perencanaan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan Lokal*. <http://sitaro.wordpress.com/2011/06/01/perencanaan-wilayah-berbasis-komoditas-unggulan-lokal/>. Diakases tanggal 19 Maret 2013.
- Nugroho, Iwan. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Produksiana.wordpress.com. 2010. Varietas Padi di Indonesia. <http://produksiana.wordpress.com/2010/05/11/varietas-padi-di-indonesia/comment-page-1/> di Publish. 11 Mei 2010. Diakses Tanggal 2 Oktober 2014.

Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sensus Pertanian (ST). 2013. *Sensus Pertanian (ST) 2013 Nasional*.

<http://st2013.bps.go.id/st2013/index.php/site?id>. Diakses 05 Oktober 2014

Sensus Pertanian (ST) 2013. *Sensus Pertanian (ST) 2013 Sulawesi-Utara*.

<http://st2013.bps.go.id/st2013/index.php/site?id=71&wilayah=Sulawesi-Utara>. Diakses 05 Oktober 2014

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Bandung.

Todaro, Michael P. 1981. *Economic Development in the Third World*. Second Edition. New York.N.Y. 10036: Longman Inc. 1560 Broadway.

